PERAN PBB-P2 SEBAGAI KONTEN PEMBELAJARAN EKONOMI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Riskiyanti
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia
e-mail: riskiyantipekom25@students.unnes.ac.id
**corresponding author*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai konten pembelajaran ekonomi dalam meningkatkan literasi fiskal dan pemahaman pembangunan berkelanjutan. PBB-P2 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan daerah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar kontekstual untuk menjelaskan kebijakan fiskal, keadilan sosial, dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pendidikan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan kerangka *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) . Proses penelusuran literatur dilakukan pada basis data nasional dan internasional dengan kriteria inklusi yang ketat hingga diperoleh puluhan artikel relevan. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi efektivitas PBB-P2, transformasi digital administrasi perpajakan, serta relevansinya dalam pembelajaran ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas penerimaan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, sementara pemanfaatan PBB-P2 sebagai materi pembelajaran ekonomi dan penguatan literasi fiskal masih terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PBB-P2 memiliki potensi kuat sebagai konten pembelajaran ekonomi berbasis isu fiskal lokal. Studi ini berkontribusi pada pengembangan materi dan inovasi pembelajaran pendidikan ekonomi yang kontekstual dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kata kunci: *pembelajaran ekonomi; literasi fiskal; PBB-P2; pembangunan berkelanjutan*

Abstract

This study aims to analyze the potential of Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) as economic learning content to strengthen fiscal literacy and support sustainable development education. Previous studies on PBB-P2 mainly focus on fiscal effectiveness, tax compliance, and regional revenue contributions, while its integration into economic education remains limited. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA framework. Literature was collected from national and international databases based on predetermined inclusion criteria to select relevant articles, which were then analyzed using thematic analysis The results indicate that most studies emphasize fiscal policy and tax administration aspects, while only a small proportion explore the educational relevance of PBB-P2. These findings highlight an opportunity to integrate local fiscal issues into economic education to enhance students' fiscal literacy and awareness of taxation. This study contributes to the development of contextual economic learning by linking local fiscal policies with sustainable development education.

Keywords: *economics education; fiscal literacy; property tax; PBB-P2; sustainable development*

PENDAHULUAN

Pembelajaran ekonomi memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman peserta didik terhadap fenomena ekonomi yang terjadi dalam kehidupan nyata, termasuk kebijakan fiskal. Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting adalah pajak dimana pemerintah Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur (Maghfiroh & Cahyatik, 2025)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak (*taxing power*). Salah satu jenis pajak baru yang dapat

dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Raspatty et al., 2025). Menurut (Sulistiana et al., 2022) kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan berkategori sangat kurang (7,83%), hal ini dikarenakan meskipun realisasinya selalu tinggi dan relatif selalu mencapai target, akan tetapi tidak bisa menjadi acuan bahwa kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah pun akan baik, karena komponen dari pendapatan asli daerah itu banyak dan apabila beberapa dari unsur pendapatan asli daerah memiliki nilai yang besar maka hal tersebut akan menyebabkan jumlah pendapatan asli daerah menjadi tinggi sehingga kontribusinya akan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 kontribusinya terhadap kemandirian fiskal daerah masih fluktuatif dan sering kali belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pembangunan. Sebagian besar studi lebih menitikberatkan pada aspek efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap PAD, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pendapatan, kesadaran, dan kualitas pelayanan. Fokus penelitian yang dominan pada aspek teknis pengelolaan tersebut menyebabkan dimensi edukatif dan pedagogis dari PBB-P2 relatif terabaikan (Dharma, 2025)

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya kesenjangan antara perkembangan kebijakan fiskal daerah dan materi yang diajarkan dalam pembelajaran ekonomi. Mahasiswa sering kali memahami pajak hanya sebagai konsep normatif dalam buku teks, tanpa memahami implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan daerah. Padahal, literasi fiskal merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki generasi muda agar mampu berperan sebagai warga negara yang sadar pajak dan kritis terhadap kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran ekonomi yang lebih kontekstual dengan memanfaatkan isu-isu fiskal lokal, seperti PBB-P2, sebagai sumber belajar yang relevan. Upaya pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan melalui penguatan konten dan pedagogi pembelajaran ekonomi berbasis kajian ilmiah yang komprehensif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah dengan mensintesis hasil-hasil penelitian terkait PBB-P2 untuk mengidentifikasi potensi pemanfaatannya sebagai materi pembelajaran ekonomi. Melalui analisis literatur yang sistematis, pendidik dan pengembang kurikulum dapat memperoleh gambaran utuh mengenai bagaimana PBB-P2 dikelola, tantangan yang dihadapi, serta nilai-nilai ekonomi dan keberlanjutan yang dapat ditransformasikan ke dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini sejalan dengan berbagai studi yang menekankan pentingnya inovasi model pembelajaran ekonomi berbasis isu kontekstual (R. A. Putra & Hanggara, 2024) serta penguatan literasi keuangan melalui pembelajaran ekonomi formal, yang terbukti berpengaruh terhadap pembentukan perilaku ekonomi generasi muda (Wiratama & Toruan, 2026) Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan inovasi pembelajaran ekonomi yang menekankan keterkaitan antara teori dan praktik.

Artikel ini merupakan penelitian orisinal dalam bentuk *Systematic Literature Review* (SLR) yang secara khusus memosisikan PBB-P2 sebagai konten pembelajaran pendidikan ekonomi, bukan sekadar sebagai objek analisis kebijakan fiskal. Keorisinilan penelitian ini terletak pada sintesis literatur lintas daerah dan lintas konteks yang mengaitkan efektivitas PBB-P2, transformasi digital perpajakan daerah, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan kebutuhan pengembangan literasi fiskal dalam pembelajaran ekonomi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat parsial, artikel ini menawarkan perspektif integratif antara kajian ekonomi publik dan pedagogi pembelajaran ekonomi.

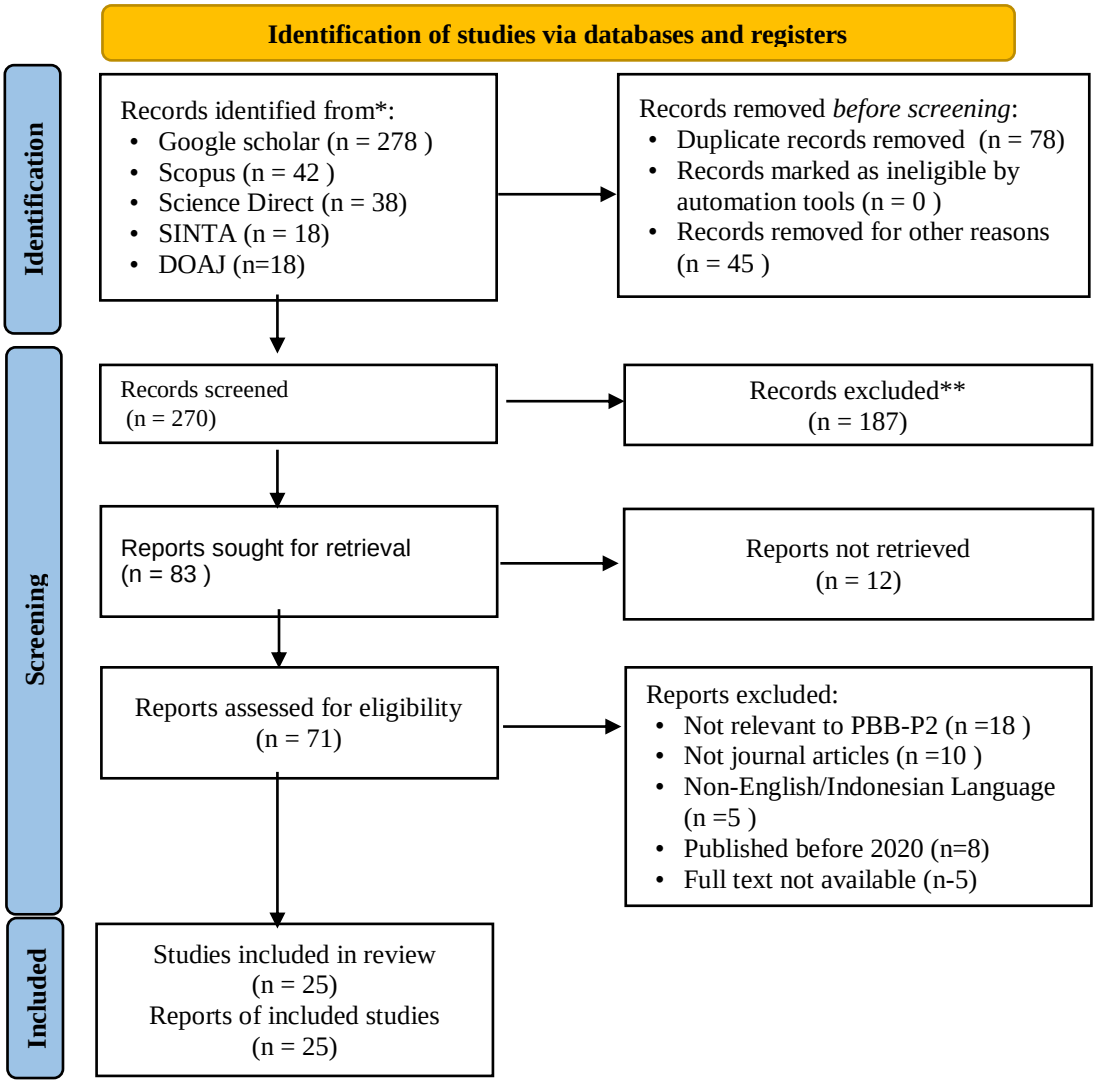
METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Systematic Literature Review* (SLR). Desain ini dipilih karena memungkinkan proses penelusuran, seleksi, dan sintesis literatur dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi. Prosedur penelitian mengikuti kerangka *Preferred Reporting Items* for *Systematic Reviews* and *Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 untuk menjamin keterlacakan dan validitas metodologis (Page et al., 2021). Bahan penelitian berupa artikel ilmiah yang relevan dengan topik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pembelajaran ekonomi, literasi fiskal, dan pembangunan berkelanjutan. Sumber data diperoleh dari basis data nasional dan internasional, meliputi *Google Scholar*, *ScienceDirect*, Scopus serta jurnal nasional terakreditasi. Peralatan penelitian meliputi perangkat komputer dengan akses internet dan perangkat lunak manajemen referensi Mendeley yang digunakan untuk pengelolaan sitasi dan penyusunan daftar pustaka sesuai gaya *American Psychological Association* (APA) edisi ke-7. Selain itu, matriks ekstraksi data digunakan sebagai instrumen untuk mencatat karakteristik metodologis dan temuan utama dari setiap artikel yang di *review*.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Penelitian

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Waktu	Artikel yang terbit dalam rentang tahun 2020-2025	Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2020
Tipe Dokumen	Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional berupa hasil penelitian empiris dan kajian pustaka	Berupa Skripsi, Tesis, Proceeding Konferensi dan Buku
Topik Utama	Fokus pada PBB-P2, Kebijakan Fiskal Daerah, Pembelajaran Ekonomi, Pembangunan Berkelanjutan	Pajak Pusat (PPN, PPh)
Aksesibilitas	Artikel dalam teks lengkap dan dapat diunduh	Artikel yang hanya berbentuk abstrak
Bahasa	Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	Selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Sumber: Data diolah peneliti (2026)



Gambar 1. Diagram Alir *Systematic Literature Review*

Prosedur penelitian dilakukan melalui empat tahap utama. Tahap pertama adalah identifikasi literatur menggunakan kata kunci "PBB-P2", "pembelajaran ekonomi", "literasi fiskal", "pajak properti", dan "pembangunan berkelanjutan" dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tahap kedua adalah penyaringan dengan menelaah judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian artikel dengan fokus penelitian. Tahap ketiga adalah uji kelayakan dengan kriteria inklusi, yaitu: (1) artikel diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025; (2) merupakan hasil penelitian empiris atau kajian konseptual mendalam; (3) membahas PBB-P2 atau pajak properti dalam konteks kebijakan fiskal daerah; dan (4) relevan dengan pe ekonomi, literasi fiskal, atau pembangunan berkelanjutan. Tahap keempat adalah inklusi, yang menghasilkan 25 artikel terpilih untuk dianalisis.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik. Setiap artikel diekstraksi dan dikodekan ke dalam matriks data, kemudian dikelompokkan ke dalam tema utama, yaitu efektivitas dan kontribusi PBB-P2, transformasi digital dan inovasi administrasi perpajakan, serta relevansi PBB-P2 sebagai konten pembelajaran ekonomi. Proses analisis dilakukan secara berulang untuk menjaga konsistensi interpretasi dan kedalaman sintesis. Dengan prosedur yang terstruktur dan terdokumentasi secara rinci, penelitian ini dapat

direplikasi oleh peneliti lain dengan menggunakan sumber data, kriteria seleksi, dan teknik analisis yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *systematic literature review* (SLR) ini, ditemukan 25 artikel yang relevan secara langsung terhadap peran PBB-P2 dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pembelajaran ekonomi. Seluruh artikel diklasifikasikan ke dalam tiga tema utama untuk mempermudah dalam menganalisis data.

Tabel 2. Sintesis Literatur

No	Tema Utama	Judul	Penulis (Tahun)	Lokasi	Temuan Utama
1	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan PBB-Perkotaan Terhadap PAD	(Nabilla et al., 2025)	Indonesia	PBB-P2 berkontribusi stabil namun efektivitasnya perlu didorong melalui pemutakhiran data objek pajak.
2	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	The Role Of State Revenue In Achieving Sustainable Development Goals	(Maghfiroh & Cahyatik, 2025)	Indonesia	Penerimaan negara merupakan instrumen fiskal utama dalam mendanai target SDGs, terutama pada sektor infrastruktur**.**
3	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	Analisis Efektivitas Penerimaan PBB-P2 dan Kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Garut	(Sulistiana et al., 2022)	Garut	Realisasi penagihan sangat efektif (>100%), namun kontribusi terhadap total PAD masih tergolong sangat kurang.
4	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	Potensi Penerimaan PBB-P2 Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai	Kurnia & Mutia (2021)	Kab. Manggarai	Identifikasi potensi pajak di tingkat desa krusial untuk meminimalkan tax gap dan meningkatkan kemandirian desa.
5	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	*The Impact of City Minimum Wage and Population on PBB Revenue in Mataram City*	(Astuti et al., 2024)	Mataram	Pertumbuhan jumlah penduduk dan kenaikan upah minimum secara signifikan meningkatkan realisasi penerimaan PBB
6	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	*Does government spending efficiency improve fiscal sustainability?*	(Afonso & Alves, 2023)	Internasional	Kepatuhan pajak properti berkaitan erat dengan kualitas layanan publik yang dirasakan masyarakat.
7	Efektivitas dan	*On the side effects of fiscal*	(Combes et al., 2025)	Internasional	Aturan fiskal yang kaku dalam pemungutan

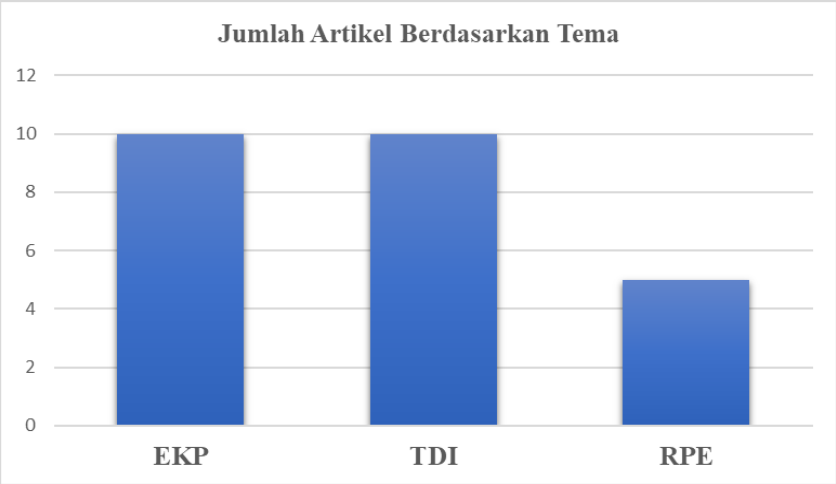
No	Tema Utama	Judul	Penulis (Tahun)	Lokasi	Temuan Utama
	kontribusi PBB-P2	*policy: Fiscal rules and income inequality*			pajak dapat memicu ketimpangan jika tidak dibarengi kebijakan redistribusi
8	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	*Property tax-induced mobility and redistribution: Evidence from mass reappraisals*	(Fraenkel, 2024)	Internasional	Revaluasi nilai properti secara massal memicu mobilitas penduduk dan redistribusi beban ekonomi di masyarakat.
9	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	*Analysis Of Land and Building Tax According To Islamic Economic Perspective*	(Rachman & Rahmawati, 2023)	Indonesia	PBB dipandang sebagai instrumen keadilan ekonomi dalam Islam selama digunakan untuk kemaslahatan publik.
10	Efektivitas dan kontribusi PBB-P2	Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Banjarnegara	(Ainiyah et al., 2021)	Banjarnegara	Efisiensi pemungutan yang baik meningkatkan daya saing daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli.
11	Transformasi Digital & Inovasi	Transformasi Digital Dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi PAD	(Palis, 2025a)	Indonesia	Strategi optimalisasi pajak daerah mendukung peningkatan kemandirian fiskal provinsi.
12	Transformasi Digital & Inovasi	Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Menuju Kemandirian Fiskal	(Dharma, 2025)	Lampung	Strategi optimalisasi pajak menuju kemandirian fiskal provinsi.
13	Transformasi Digital & Inovasi	Pengaruh Pendapatan, Kesadaran WP dan SPPT Terhadap Piutang PBB-P2	(Gunawan & Astawa, 2025)	Buleleng	Ketepatan penyampaian SPPT dan tingkat kesadaran wajib pajak efektif dalam menurunkan saldo piutang pajak

No	Tema Utama	Judul	Penulis (Tahun)	Lokasi	Temuan Utama
14	Transformasi Digital & Inovasi	Implementasi Kebijakan Pengelolaan PBB-P2 di BPKPD Kota Sukabumi	(Raspatty et al., 2025)	Sukabumi	Keberhasilan pengelolaan pajak daerah ditentukan oleh kualitas komunikasi kebijakan dan disposisi pelaksana di lapangan.
15	Transformasi Digital & Inovasi	*Performance of The Public Service Bureaucracy: PBB-P2 Based on Information and Technology*	(Rahmawati & Putra, 2024)	Indonesia	Inovasi layanan berbasis IT mempercepat birokrasi dan meningkatkan kepuasan wajib pajak di area urban maupun rural.
16	Transformasi Digital & Inovasi	Implikasi UU No 1/2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD	(Fithrina et al., 2024)	Sumatra Barat	Kebijakan fiskal berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.
17	Transformasi Digital & Inovasi	*Fiscal decentralization and tax collection: evidence from the rural property tax in Brazil*	(Caldeira et al., 2023)	Brazil	Penilaian massal properti memengaruhi distribusi beban pajak dan mobilitas penduduk.Desentralisasi wewenang ke pemerintah lokal meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengumpulan pajak properti.
18	Transformasi Digital & Inovasi	Strategi Pemprov DKI Jakarta Dalam Rangka Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Melalui PBB-P2	(E. Putra & Lutfi, 2021)	DKI Jakarta	PBB-P2 digunakan secara strategis sebagai instrumen regulasi untuk memelihara keberadaan ruang terbuka hijau.
19	Transformasi Digital & Inovasi	*Provision Of Public Goods And Services By The Government And Property Tax Compliance*	(Syaifa Noor Ilmiyani & Djamaluddin Djamaluddin, 2020)	Indonesia	Penyediaan barang publik yang berkualitas oleh pemerintah terbukti meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
20	Transformasi Digital & Inovasi	Implementasi Program "Menjelajah Desa	(Putri et al., 2020)	Langkat	Pendekatan layanan proaktif (jemput bola) sangat efektif meningkatkan

No	Tema Utama	Judul	Penulis (Tahun)	Lokasi	Temuan Utama
		Menjemput Pajak"			partisipasi pajak di wilayah pelosok
21	Relevansi Pembelajaran ekonomi	Engaging students in education for sustainable development: The benefits of active learning	(Howell, 2021)	Inggris	*Active learning* dan flipped classroom meningkatkan keterlibatan siswa dalam isu pembangunan berkelanjutan.
22	Relevansi Pembelajaran ekonomi	Pengaruh Motivasi dan Literasi Perpajakan Terhadap Minat Karir di Bidang Perpajakan	(Yakin & Widayati, 2022)	Surabaya	Literasi perpajakan berpengaruh terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang perpajakan
23	Relevansi Pembelajaran ekonomi	Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Ekonomi	(Amal et al., 2024a)	Banjarmasin	Kurikulum Merdeka meningkatkan motivasi belajar ekonomi secara kontekstual.
24	Relevansi Pembelajaran ekonomi	*The Effect of Financial Literacy, Self-Efficacy, and Locus of Control on Financial Management*	(Faqihuddin & Nirbita, 2025)	Yogyakarta	Literasi keuangan dan efikasi diri berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan
25	Relevansi Pembelajaran ekonomi	*The Influence of Family Economic Education on Financial Management Behavior*	(Firdaus et al., 2025)	Tuluagung	Pendidikan ekonomi keluarga berperan dalam membentuk perilaku ekonomi individu.

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 2, penulis melakukan analisis tematik untuk mengetahui keterkaitan antara rujukan dalam mendukung peran PBB-P2 sebagai konten pembelajaran ekonomi. Distribusi literatur menunjukkan bahwa fokus yang berimbang antara aspek teknis perpajakan sebesar 80% dan aspek edukasi ekonomi sebesar 20%.



Keterangan:
EKP: Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2
TDI: Transformasi Digital dan Administrasi Perpajakan
RPE: Relevansi PBB-P2 sebagai Konten Pembelajaran Ekonomi

Gambar 2. Distribusi Fokus Penelitian Berdasarkan Tema Utama

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa tren penelitian mengenai PBB-P2 dalam basis data nasional dan internasional dalam rentang 2020 - 2025 masih didominasi oleh aspek kebijakan fiskal dan transformasi digital dengan masing- masing mencakup 40% dari total literatur yang dianalisis. Temuan yang menarik adalah presentasi literatur dengan teman relevansi PBB-P2 sebagai konten pembelajaran ekonomi baru mencapai 20%. Hal ini dapat digunakan sebagai celah penelitian (*research gap*) yang menunjukkan jika pembahasan PBB-P2 masih jarang digunakan dalam ranah pedagogik.

a. Efektivitas dan Kontribusi PBB-P2 Terhadap PAD

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu komponen penting dalam instrumen kebijakan fiskal. PBB-P2 menjadi sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, PBB-P2 menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Kajian ini mengevaluasi kinerja fiskal PBB-P2 melalui sintesis hasil penelitian terdahulu guna memetakan implementasi kebijakan perpajakan daerah secara empiris.

Hasil analisis literatur menunjukkan adanya paradoks kinerja PBB-P2 di tingkat daerah. Sejumlah studi, seperti (Sulistiana et al., 2022) di Kabupaten Garut dan (Ainiyah et al., 2021) di Kabupaten Banjarnegara, mengindikasikan bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 secara administratif berada pada kategori sangat efektif, dengan tingkat realisasi penerimaan di atas 90 persen dari target. Namun, capaian efektivitas tersebut tidak berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap PAD, yang masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah (Ainiyah et al., 2021)

Rendahnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD dipengaruhi oleh faktor struktural dan perilaku. (Gunawan & Astawa, 2025) mengidentifikasi rendahnya kesadaran wajib pajak sebagai penyebab utama tingginya piutang PBB-P2, sementara (Nabilla et al., 2025) menyoroti keterbatasan pemutakhiran data objek pajak yang berdampak pada tidak optimalnya penggalian potensi pajak. Secara komparatif, studi desentralisasi fiskal di Brazil menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak properti berkorelasi dengan kualitas layanan publik yang dirasakan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan

kinerja PBB-P2 tidak cukup dilakukan melalui pendekatan teknis-administratif semata, tetapi memerlukan penguatan literasi fiskal dan edukasi publik sebagai strategi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan fiskal daerah.

b. Transformasi Digital dan Inovasi Administrasi Perpajakan

Keterbatasan pendekatan teknis-administratif dalam meningkatkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi transformasi digital dan inovasi dalam administrasi perpajakan. Digitalisasi pajak merupakan proses peralihan dari sistem manual ke sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan kualitas pelayanan perpajakan.Selain evaluasi terhadap capaian kontribusi fiskal, integrasi teknologi kini menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam memitigasi berbagai kendala teknis serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Transformasi digital muncul sebagai tema sentral dalam modernisasi pemungutan pajak daerah. (Palis, 2025) menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola perpajakan terbukti meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kebocoran anggaran. Sejalan dengan temuan tersebut, studi (Rahmawati & Putra, 2024) menunjukkan bahwa penerapan layanan perpajakan berbasis teknologi informasi mampu meningkatkan kinerja birokrasi serta mempermudah akses pembayaran bagi wajib pajak.

Dorongan terhadap inovasi administrasi perpajakan semakin menguat seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Raspatty et al., 2025) mencatat bahwa regulasi ini mengubah struktur sumber PAD secara signifikan dan menuntut peningkatan profesionalisme digital pemerintah daerah. Selain berdampak pada aspek fiskal, digitalisasi PBB-P2 juga dikaitkan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Putra & Lutfi, 2021) serta pengendalian tata ruang melalui kebijakan insentif dan disinsentif pajak, sebagaimana diterapkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa PBB-P2 telah bertransformasi menjadi instrumen kebijakan publik yang bersifat multidimensi, tidak hanya sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai alat pengarah pembangunan yang lebih akuntabel dan adaptif terhadap masyarakat yang memiliki literasi digital.

c. Relevansi PBB-P2 sebagai Konten Pembelajaran Ekonomi

Pendidikan formal memiliki peran strategis dalam menginternalisasi nilai kesadaran pajak sebagai upaya menghubungkan kebijakan fiskal teknis dengan pembentukan karakter ekonomi warga negara. Dalam konteks tersebut, keterbatasan efektivitas fiskal dan peran transformasi digital menjadi landasan penting bagi integrasi isu PBB-P2 ke dalam pembelajaran ekonomi di sekolah.

Implementasi topik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pembelajaran ekonomi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami konsep ekonomi tidak hanya secara teoretis, tetapi juga melalui praktik yang relevan dengan kehidupan nyata. Kekuatan data fiskal dan kemajuan transformasi digital dalam pengelolaan PBB-P2 tidak akan memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian daerah apabila tidak diiringi dengan internalisasi nilai dan pemahaman melalui jalur pendidikan. Oleh karena itu, integrasi isu PBB-P2 ke dalam pembelajaran ekonomi menjadi relevan sebagai upaya membangun kesadaran fiskal sejak dini.

Implementasi Kurikulum Merdeka saat ini memberikan ruang yang luas bagi pendidik untuk menyajikan materi ekonomi secara kontekstual. PBB-P2 dapat dimanfaatkan sebagai studi kasus konkret untuk membahas berbagai konsep ekonomi, seperti fungsi pajak dalam perekonomian, keadilan distributif, peran negara dalam penyediaan barang publik, serta keterkaitan antara pajak dan pembangunan daerah. Hal ini selaras dengan penelitian di

SMAN 5 Banjarmasin membuktikan bahwa pembelajaran yang relevan dengan realitas lingkungan siswa mampu meningkatkan motivasi belajar secara signifikan (Amal et al., 2024)

Sumber literatur di bidang pembelajaran ekonomi menegaskan bahwa literasi keuangan dan literasi perpajakan memiliki pengaruh jangka panjang terhadap pembentukan perilaku ekonomi individu ((Yakin & Widayati, 2022; Firdaus et al., 2025) Melalui penerapan model pembelajaran aktif, seperti *project-based learning* atau *flipped classroom*, peserta didik tidak hanya memahami PBB-P2 sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kewarganegaraan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, pemosisian PBB-P2 sebagai sumber belajar ekonomi yang kontekstual merupakan langkah strategis untuk mentransformasi materi yang selama ini dianggap administratif menjadi media pembangunan karakter kewarganegaraan. Pendekatan ini sekaligus mengisi celah penelitian (*research gap*) yang menunjukkan masih terbatasnya kajian PBB-P2 dalam ranah pedagogik, serta memperkuat peran pembelajaran ekonomi dalam menciptakan generasi yang sadar pajak dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia masih terkendala oleh kesenjangan antara kinerja operasional dan kontribusinya terhadap penguatan otonomi fiskal daerah. Tingginya capaian efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB-P2 secara administratif belum sepenuhnya berimplikasi pada peningkatan kapasitas keuangan daerah secara signifikan. Transformasi digital dalam administrasi PBB-P2 terbukti berperan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi birokrasi, dan kualitas layanan perpajakan. Namun demikian, keberlanjutan efektivitas kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi dan kesadaran fiskal masyarakat. Tanpa dukungan pemahaman publik yang memadai, digitalisasi pajak cenderung terbatas pada aspek teknis dan belum optimal dalam memperkuat basis penerimaan daerah. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi PBB-P2 ke dalam pembelajaran ekonomi merupakan strategi penting dalam membangun kesadaran fiskal sejak dini. Pemanfaatan PBB-P2 sebagai konten pembelajaran kontekstual, khususnya dalam kerangka Kurikulum Merdeka, memungkinkan peserta didik memahami fungsi pajak tidak hanya secara konseptual, tetapi juga dalam praktik kehidupan sosial-ekonomi. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pendekatan lintas disiplin yang mengaitkan kajian kebijakan perpajakan daerah dengan perspektif pembelajaran ekonomi. Pendekatan tersebut menawarkan kerangka konseptual bagi pendidik untuk mengembangkan pembelajaran pajak sebagai sarana pembentukan warga negara yang memiliki literasi ekonomi, kesadaran fiskal, dan orientasi terhadap pembangunan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Magister Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang atas penyediaan fasilitas riset dan dukungan akademis pangkalan data ilmiah selama penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Afonso, A., & Alves, J. (2023). Does government spending efficiency improve fiscal sustainability? *European Journal of Political Economy*. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102403

Ainiyah, G. Z., Pratama, Y. A., & Pradikha, E. (2021). Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, *7*(1). https://doi.org/10.25134/jrka.v7i1.4397

Amal, I., Atmono, D., Hasanah, M., & Nor, B. (2024a). Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Penggerak SMAN 5 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *12*(2), 315–321. https://doi.org/10.26740/jupe.v12n2.p315-321

Amal, I., Atmono, D., Hasanah, M., & Nor, B. (2024b). Pengaruh Penerapan Kurikulum Merdeka terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Ekonomi di Sekolah Penggerak SMAN 5 Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *12*(2), 315–321. https://doi.org/10.26740/jupe.v12n2.p315-321

Astuti, W., Lestari, B. A. H., & Ningtyas, R. P. (2024). The Impact of City Minimum Wage and Population on Rural and Urban Land on Building Tax Revenue in Mataram City. *International Journal of Public Finance*, *9*(1), 1–16. https://doi.org/10.30927/ijpf.1339408

Caldeira, T. C. M., Ehrl, P., & Moreira, T. B. S. (2023). Fiscal decentralization and tax collection: evidence from the rural property tax in Brazil. *European Journal of Political Economy*, *78*. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2023.102396

Combes, J. L., Debrun, X., Minea, A., Sawadogo, P. N., & Vinturis, C. (2025). On the side effects of fiscal policy: Fiscal rules and income inequality. *European Journal of Political Economy*, *90*. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102534

Dharma, A. B. (2025). Strategi Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Menuju Kemandirian Fiskal Di Provinsi Lampung Policy Strategy for Optimizing Local Tax Revenue To Support Fiscal Independence in Lampung Province. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, *13*(2), 289–301.

Faqihuddin, M. Z., & Nirbita, B. N. (2025). The Effect of Financial Literacy, Income, Financial Self-Efficacy, and Locus of Control on the Financial Management. *Economic Education Analysis Journal*, *14*(3), 318–328. https://doi.org/10.15294/eeaj.v14i3.33797

Firdaus, E. B., Forijati, RR., & Prastyaningtyas, E. W. (2025). The Influence of Family Economic Education, Income, and Lifestyle on the Financial Management Behavior of Housewives in Balesono Village. *Economic Education Analysis Journal*, *14*(3), 356–369. https://doi.org/10.15294/eeaj.v14i3.28820

Fithrina, H., Gusminarti, G., Darnis, D., & Kurniawan, F. (2024). Implikasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Terhadap Keberadaan Pajak Daerah Sebagai Sumber PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Nagari Law Review*, *7*(3), 506. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.506-515.2024

Fraenkel, R. (2024). Property tax-induced mobility and redistribution: Evidence from mass reappraisals. *Public Budgeting and Finance*, *44*(4), 28–64. https://doi.org/10.1111/pbaf.12369

Gunawan, I. M. D., & Astawa, I. G. P. B. (2025). Pengaruh Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2022. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *16*(03), 648–659. https://doi.org/10.23887/jap.v16i03.81796

Howell, R. A. (2021). Engaging students in education for sustainable development: The benefits of active learning, reflective practices and flipped classroom pedagogies. *Journal of Cleaner Production*, *325*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129318

Maghfiroh, N. U., & Cahyatik. (2025). *The Role Of State Revenue In Achieving Sustainable Development Goals*. https://serambi.org/index.php/assets/submissions

Meilinda Kurnia, Y., Dwi, K., & Mutia, L. (n.d.). Potensi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Desa Bangka Lelak Kabupaten Manggarai. In *Maret* (Vol. 2021, Number 1).

Nabilla, F., Khadijah, K., Laili, N. I., Richmayati, M., & Sandra, E. (2025). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Pbb-Perkotaan) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Realible Accounting Journal*, *4*(2), 114–118. https://doi.org/10.36352/raj.v4i2.1022

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., … Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery*, *88*, 105906. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.105906

Palis, K. (2025a). Transformasi Digital Dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pad Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, *5*(1), 163–190. https://doi.org/10.53625/juremi.v5i1.10508

Palis, K. (2025b). Transformasi Digital Dan Reformasi Tata Kelola Perpajakan Daerah: Studi Kasus Optimalisasi Pad Di Indonesia. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, *5*(1), 163–190. https://doi.org/10.53625/juremi.v5i1.10508

Putra, E., & Lutfi, A. (2021). Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Melalui PBB-P2. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *6*(2), 672. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2195

Putra, R. A., & Hanggara, A. (2024). MODEL PJBL BERBANTU APLIKASI DALAM PEMBELAJARAN AKUNTANSI. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, *21*(02), 1–10. https://doi.org/10.25134/equi.v21i02.9723

Putri, D. N. A., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2020). Implementasi Program Menjelajah Desa Menjemput Pajak Pada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Langkat. *PERSPEKTIF*, *9*(2), 195–209. https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3373

Rachman, Y. T., & Rahmawati, P. A. E. (2023). *REVIEW OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE Analysis Of Land and Building Tax According To Islamic Economic Perspective* (Vol. 6, Number 1).

Rahmawati, R., & Putra, R. (2024). Performance of The Public Service Bureaucracy: Urban, Rural, and Building Tax Service Model (PBB-P2) Based on Information and Technology. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, *31*(2). https://doi.org/10.20476/jbb.v31i2.1380

Raspatty, F., Indah, D., & Sudrajat, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi. *Jurnal Tata Kelola Dan Kebijakan Publik*, *1 (4)*, 652–663. https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jtkkp/article/view/91

Sulistiana, E., Alkautsar, M., & Hamdah, D. F. L. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, *21*(2), 089–097. https://doi.org/10.52434/jwe.v21i2.1920

Syaifa Noor Ilmiyani, B., & Djamaluddin Djamaluddin, S. (2020). Provision of Public Goods and Services by The Government and Property Tax Compliance. *Journal of*

Indonesian Applied Economics, *8*(2), 35–45. https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2020.008.02.4

Wiratama, G., & Toruan, P. E. B. (2026). *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi Peran Pendidikan Manajemen Keuangan Formal Terhadap Perilaku Keuangan Generasi Z. 23*, 1. https://doi.org/10.25134/bvbt6w5

Yakin, A. A., & Widayati, I. (2022). Pengaruh Motivasi, Mata Kuliah Perpajakan dan Literasi Perpajakan Terhadap Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dalam Berkarir di Bidang Perpajakan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, *10*(2), 176–187. https://doi.org/10.26740/jpak.v10n2.p176-187